

DINAMIKA PERKEMBANGAN KRISTEN [-PROTESTAN] DI INDONESIA

dalam Konteks Pluralitas Masyarakat Indonesia

Tantangan dan Peluang Ditinjau dari Perspektif Historis¹

oleh: Jan S. Aritonang²

Pengantar

1. Sekarang ini di Indonesia tidak mudah lagi bagi kita untuk menggunakan istilah **Protestan**, karena banyak gereja, yang dulu dimasukkan pemerintah ke ‘keranjang’ Protestan, misalnya gereja-gereja Pentakostal dan Kharismatik, dan juga sebagian kalangan Injili, sekarang tidak suka lagi menyangand predikat itu, kendati secara historis mereka adalah keturunan gereja-gereja Protestan. Alasan mereka a.l. adalah bahwa istilah Protestan hanya cocok untuk ‘gereja-gereja tradisional’ yang mewarisi ajaran para reformator gereja abad ke-16, sementara mereka memandang diri sudah melangkah lebih jauh, yaitu melakukan reformasi terhadap gereja-gereja Protestan tradisional itu.³ Selain itu memang ada sejumlah gereja yang oleh pemerintah RI c.q. Departemen Agama dimasukkan ‘keranjang’ Protestan, padahal mereka memang tidak merupakan bagian dari gerakan/mazhab Protestan (misalnya Gereja Ortodoks [Indonesia], Gereja Katolik Bebas, dsb.).⁴
2. Dalam makalah ini - demikian juga dalam proses belajar-bersama kita kali ini - mau tidak mau kalangan Pentakostal-Kharismatik dan Injili juga masih kita masukkan ke dalam kategori Protestan. Apakah peserta kegiatan ini, terutama yang berasal dari kalangan itu, setuju atau tidak, baiklah kita diskusikan. Seandainya tidak setuju, kiranya mereka dapat menyebut nama/istilah lain untuk menamakan diri dan menyebut identitas mereka.
3. Orang-orang Kristen-Protestan sudah hadir di Nusantara/Indonesia sejak akhir abad ke-16 (tepatnya tahun 1596), berarti sudah lebih dari empat abad, dibawa oleh sejumlah personel armada dagang asal Belanda, yang sejak 1602 berhimpun dalam *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Di dalam armada itu cukup sering (walau tidak selalu) diikuti-sertakan pelayan rohani, entah itu pendeta ataupun penghibur orang sakit (*ziekentrooster*). Mereka terutama bertugas melayani kerohanian para personel VOC itu, baik ketika berlayar maupun

¹ Disampaikan pada acara “Studi Agama-agama – Belajar Bersama Kelompok Antar-Iman”, di Manado dsk., 19-22 November 2007.

² Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) sejak 1977, dosen tetap bidang Sejarah Gereja di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta sejak 1988, Ketua STT Jakarta 1995-1999 dan 2007-2011, dan salah seorang Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) periode 2004-2009. Doctor of Theology (D.Theol.) dari SEAGST 1987, Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Universiteit Utrecht 2000. Menulis sejumlah buku Sejarah Gereja.

³ Para pengamat tertentu menyebut Reformasi yang dicanangkan Luther, Calvin dkk. sebagai Reformasi gelombang pertama, Pietisme dan Revival sebagai Reformasi kedua, dan Pentakostal-Kharismatik sebagai Reformasi ketiga. Lihat a.l. C. Lindberg, *The Third Reformation? – Charismatic Movements and the Lutheran Tradition* (Macon-Georgia: Mercer University Press, 1983).

⁴ Itulah sebabnya sejak tahun 1999 Ditjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama berganti nama menjadi Ditjen Bimas Kristen, walaupun hal itu menimbulkan persoalan juga, karena Katolik juga mestinya masuk ke dalam kategori Kristen. Tetapi begitulah yang terjadi di negara kita. Sekarang nama agama-agama yang diakui Negara secara resmi adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

ketika mendirikan pangkalan di darat. Tetapi kemudian ada saja segelintir dari mereka yang mengadakan kontak dengan masyarakat pribumi, yang sudah beragama Islam maupun beragama suku, termasuk memberitakan Injil kepada mereka dan mengajak mereka menjadi Kristen. Hal ini semakin terlihat ketika VOC mendirikan lembaga gereja dan jemaat-jemaat lokal di sejumlah pangkalan (pelabuhan) yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara.

4. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan, kita tidak dapat melihat secara rinci dinamika perkembangan kalangan Kristen [-Protestan] selama sekitar empat abad ini. Kita hanya menampilkan beberapa contoh peristiwa dari babakan sejarah bangsa ini (mengikuti babakan perkembangan di bidang politik), terutama yang berkaitan dengan perjumpaannya dengan umat beragama lain, khususnya Islam. Bagi yang berminat melakukan studi lebih mendalam, maupun interaksi kalangan Kristen [-Protestan] dengan umat beragama lain yang non-Muslim, dipersilahkan mempelajari literatur yang sudah sangat banyak tersedia sekarang ini.

I. Perkembangan Kristen [-Protestan] pada Masa VOC (1602 - 1799)

Seperti telah dikemukakan di atas, Kristen-Protestan hadir di Indonesia sejak akhir abad ke-16, dibawa oleh personel armada dagang Belanda yang kemudian bergabung dalam VOC. Walaupun Gereja Protestan Belanda pada masa itu – mengacu pada Pengakuan Iman Belanda tahun 1561 pasal 36⁵ - menitipkan tugas kepada VOC untuk ikut mewartakan Injil dan ajaran Kristen-Protestan kepada masyarakat yang mereka jumpai, termasuk di Minahasa, namun kongsi dagang ini maupun para personelnnya tidak banyak berminat kepada tugas itu; minat mereka lebih banyak kepada perolehan keuntungan material lewat penguasaan dan monopoli perdagangan hasil bumi dan komoditi lainnya. Karena itu tidak heran bila jumlah orang Kristen pada periode ini tidak berkembang, bahkan merosot, dibandingkan dengan jumlah orang Kristen-Katolik pada masa Portugis-Spanyol abad ke-16. Jemaat-jemaat Kristen juga hanya ada di beberapa kota pelabuhan (a.l. Batavia, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Ambon, dan Ternate), yang secara organisatoris diurus oleh sebuah Majelis/Pengurus Gereja yang berkedudukan di Batavia, yang pemimpin tertingginya adalah pejabat VOC.⁶

Karena jemaat-jemaat pada zaman VOC pada umumnya adalah “jemaat benteng”, yakni berada di lingkungan benteng-benteng VOC, maka hubungan mereka (baik yang Belanda maupun pribumi dan orang-orang Timur-asing: Cina dan India) dengan masyarakat beragama lain, terutama Islam, sangatlah terbatas. Lagi pula para pejabat VOC dan para pendeta yang dipekerjakan oleh VOC pada umumnya menganut pemahaman yang negatif tentang Islam.⁷

⁵ Th. Van den End (penyeleksi), *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme* (Jakarta: BPK G. Mulia, 2000), h. 53.

⁶ Pada awal masa VOC di Nusantara, semua orang Kristen di negeri ini adalah eks orang Katolik yang diprotestankan oleh Belanda, secara sukarela ataupun paksaan. Memasuki pertengahan hingga akhir periode VOC, ada sejumlah pribumi maupun keturunan Cina yang masuk Kristen Protestan, tetapi jumlahnya sangat terbatas, sehingga jumlah orang Kristen di negeri ini pada penghujung abad ke-18 lebih sedikit dari pada sekitar 1560-an, pada masa puncak perdagangan dan kekuasaan Portugis dan Spanyol di negeri ini. Lihat a.l. Th. van den End, *Ragi Carita 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), h. 52-136.

⁷ Tentang sikap dan pandangan para pejabat VOC terhadap Islam, lihat a.l. K. Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian – Kaum Kolonial dan Islam di Indonesia (1596 – 1942)* (terj.) (Bandung: Mizan, 1995).

Salah satu kasus yang memperlihatkan sikap negatif terhadap Islam itu adalah pembantaian terhadap penduduk beragama Islam di pulau Banda pada tanggal 8-11 Maret 1621, karena mereka tidak mau tunduk pada klaim hak monopoli (oktrooi) perdagangan cengkeh. Ds. Hulsebos, pendeta VOC pada masa itu, menyebut dan merayakan pembantaian itu sebagai “suatu penaklukan yang diberkati oleh Tuhan, yang patut kita syukuri dan mengucapkan pujian yang tak terhingga kepada Allah”, walaupun sebenarnya tindakan itu tidak didasarkan pada pertimbangan agama, yaitu menindas orang Islam dalam rangka memajukan kekristenan.⁸

Tidak selalu para pejabat VOC maupun masyarakat Kristen Protestan pada periode ini bersikap negatif terhadap umat beragama lain. Kalau hubungan dengan umat beragama lain itu, khususnya Islam, mendatangkan keuntungan dagang, mereka yang Kristen itu tidak segan-segan menjalin hubungan baik dan menjadikan kalangan Islam sebagai sekutu dagangnya. Terutama kalangan personel VOC yang memang kadar kekristenannya pada umumnya cukup rendah, tidak jarang mereka justru menghambat perkembangan agama dan gereja Kristen. Di daerah-daerah yang penduduknya sebagian besar sudah beragama Islam, pemimpin VOC tidak mengizinkan pendeta ataupun penginjil untuk menyelenggarakan kegiatan gereja, apalagi sampai mendirikan gedung gereja. Peristiwa konflik bermuatan agama pada masa kekuasaan Portugis-Spanyol abad ke-16 juga dipelajari oleh kalangan VOC, dan mereka tidak mau kalau hal itu terulang, dan bila upaya pengembangan gereja/agama Kristen merugikan perdagangan.

Menyimpulkan perkembangan kekristenan pada periode 1522-1799, Van den End berkata:

Harus diakui bahwa usaha-usaha mengabarkan Injil dan menanamkan gereja di Indonesia selama waktu 2½ abad ini adalah mengecewakan. Ini benar kalau kita melihat hasil itu dari segi jumlah orang yang masuk Kristen – kira-kira 100.000 orang – dan membandingkannya dengan kemajuan yang dicapai oleh agama Islam dalam kurun waktu yang sama. Tetapi hal yang sama juga harus dikatakan mengenai kekuatan batiniah kekristenan di Indonesia pada zaman itu. Hanya di Maluku Tengah berhasil dibangun suatu kekristenan yang agak mantap sedikit. Pengaruh agama Kristen di luar lingkungan gereja adalah kecil sekali.⁹

Lebih lanjut Van den End menyimpulkan faktor-faktor penyebab keadaan itu, a.l.¹⁰:

1. Tenaga penginjil kurang sekali. Lagi pula, banyak di antara tenaga itu yang mati ketika baru saja mulai bekerja, sehingga pekerjaan berjalan tersendat-sendat.
2. Sebagian rohaniwan yang datang dari Eropa hanya memberi pemeliharaan rohani kepada teman-teman sebangsanya dan tidak memperhatikan orang-orang Indonesia.
3. Tenaga Indonesia kurang dididik dan/atau kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakatnya.
4. Injil dibawa dalam bahasa asing, dan bentuk-bentuk kehidupan gerejawi merupakan tiruan dari keadaan di Eropa.
5. Pemimpin-pemimpin jemaat tidak cukup mengenal agama/adat Indonesia-asli.
6. Orang-orang Portugis dan Belanda datang ke Indonesia dengan maksud mengabarkan Injil dan mencari kekayaan; itu berarti bahwa mereka “mengabdikan sekaligus kepada Allah dan Mammon”.
7. Kelakuan buruk pendatang dari Eropa, yang merusak kesediaan [masyarakat pribumi] untuk menerima agama mereka.
8. Gereja sering menyesuaikan diri dengan kemauan penguasa dan dengan keadaan masyarakat (status quo).

⁸ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: BPK G. Mulia, ³2006), h. 61.

⁹ Th. van den End, *Ragi Carita 1*, h. 135.

¹⁰ *Ibid.*, h. 135-6.

II. Perkembangan Kristen [-Protestan] pada Masa Hindia-Belanda (1800 – 1942)

Periode ini dapat disebut sebagai masa puncak perkembangan Kristen (baik Katolik maupun - dan terutama - Protestan) di Indonesia. Sebenarnya – sebagai dampak dari semangat *Aufklärung* (Enlightenment, Pencerahan) yang berlangsung di sepanjang abad ke-18 di Eropa – pemerintah Hindia-Belanda (perpanjangan tangan pemerintah Belanda, yang menggantikan VOC sejak 1800) menganut azas netralitas dalam hal agama, setidaknya-tidaknya secara teoritis. Dengan kata lain, pemerintah H-B di atas kertas tidak memihak kepada salah satu agama mana pun, termasuk Kristen. Tetapi karena sebagian besar pejabat pemerintah H-B itu – paling tidak secara formal – beragama Kristen, tak dapat disangkal bahwa ada dari antara mereka yang memperlihatkan dukungan terhadap perkembangan gereja/kekristenan.

Tetapi faktor utama yang menyebabkan perkembangan Kristen sangat dahsyat pada masa ini adalah perkembangan di kalangan Kristen sendiri, bermula di Eropa lalu meluas ke Amerika. Sebagai reaksi terhadap munculnya Rasionalisme dan Pencerahan, sejak awal abad ke-18 dan memuncak pada abad ke-19, di kalangan Kristen muncullah gerakan dan semangat Pietisme (kesalehan) dan Revival (kebangunan rohani). Kedua semangat ini, ketika bergabung, mendorong banyak orang Kristen – mula-mula di luar gereja-gereja resmi, belakangan juga di dalamnya – untuk melakukan penginjilan (baca: pengkristenan; mentobatkan orang yang bukan Kristen) kepada masyarakat pribumi maupun pendatang (terutama kalangan Tionghoa).

Sejak awal abad ke-19 puluhan (bahkan mungkin ratusan) badan/lembaga penginjilan – dari kalangan Katolik maupun Protestan – yang datang dari Eropa dan Amerika, dan bekerja di Indonesia. Mereka mengirimkan ribuan tenaga penginjil, baik penginjil-langsung (verbal) maupun penginjil-tidak-langsung, yakni yang bekerja di berbagai sarana pelayanan: pendidikan/persekolahan, kesehatan/rumahsakit, pertanian, pertukangan, bahasa, media komunikasi, dsb. Mereka diizinkan pemerintah H-B bekerja dan menyebar di seluruh wilayah Nusantara, kecuali di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam (a.l. Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, sebagian besar Jawa, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian besar Sulawesi Selatan + Tenggara) maupun Hindu (yaitu Bali). Belakangan, lewat perjuangan yang gigih, para penginjil itu diizinkan juga oleh pemerintah H-B untuk bekerja di daerah-daerah tersebut, kendati dengan pembatasan yang sangat ketat.

Di daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya masih beragama suku, lembaga-lembaga penginjilan (*zending, mission*) Protestan berhasil membentuk jemaat-jemaat (gereja lokal) Kristen, bahkan mendirikan organisasi-organisasi gereja (di kalangan Protestan sering disebut Sinode) yang menghimpun dan membawahi jemaat-jemaat lokal. Di antara organisasi gereja/sinode itu ada yang bertumbuh menjadi besar dan kuat, a.l. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM), Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Masehi Injili Timor (GMIT), Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Gereja Toraja, Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH), Gereja Masehi Injili Sangir-Talaud (GMIST), Gereja

Kristen Injili di Tanah Papua (GKI Papua), Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Gereja Kristen Sumba (GKS), Gereja Methodist Indonesia (GMI), Gereja Kristen Muria Indonesia, (GKMI), dan Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB). Gereja-gereja ini kelak (sejak 1950) bergabung dalam Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI, sejak 1984 menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, PGI).

Walaupun lembaga-lembaga penginjilan itu datang dari lingkungan gereja yang berbeda-beda dalam hal ajaran dan tradisi (termasuk tata organisasi dan jabatan gereja), tetapi ketika mereka berhasil membentuk jemaat-jemaat lokal dan organisasi gereja pada aras Sinode, sebagian besar dari mereka tidak terlalu menekankan kekhasan dari gereja-asal masing-masing. Mereka memberi peluang dan ruang, walaupun tidak sangat luas, kepada masing-masing gereja untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan konteks sosial-budayanya. Karena itulah gereja-gereja tersebut di atas (kecuali GMI dan GKMI) lebih bercorak etnis-regional (kesukuan dan kedaerahan) ketimbang konfesional-denominasional (dogma dan tradisi gereja asal), kendati corak dan identitas konfesional di sana-sini diperlihatkan juga (misalnya HKBP dan BNKP mengaku beraliran Lutheran; GMIM, GPM, GMIT, GKJ, GKJW, GKS, GBKP, dan GMIH mengaku Calvinis; GKMI beraliran Mennonit, dst.).

Lembaga-lembaga penginjilan dari Barat itu, dan pada gilirannya gereja-gereja yang ditumbuhkannya, tidak hanya berupaya mempertobatkan orang-orang beragama suku (dan beragama lain) menjadi Kristen, dalam rangka menambah jumlah warga. Mereka – seperti sudah disebut di atas - juga bergiat di berbagai bidang pelayanan sosial-kemanusiaan. Bidang-bidang ini bisa saja dilihat sebagai bidang-penunjang (*hulpdienst*) terhadap bidang utama (*hoofddienst*) yaitu penginjilan dalam rangka pengkristenan. Tetapi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan yang didirikannya tidak memaksa orang-orang yang mereka layani untuk menjadi Kristen. Karena itu sejak dulu hingga sekarang kita dengan mudah melihat siswa/mahasiswa dan pasien beragama non-Kristen di sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit Kristen. Bagi pihak penyelenggara, yang terpenting adalah bahwa masyarakat luas sedikit-banyak mengenal nilai-nilai kristiani melalui pelayanan yang mereka terima.

Karena lembaga-lembaga penginjilan dan gereja-gereja yang dibentuknya itu banyak berkiprah di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan pertukangan, tak heran bila pada masa H-B ini tingkat sosial-ekonomis warga masyarakat Indonesia yang beragama Kristen pada umumnya lebih tinggi dari warga masyarakat beragama lain. Dalam hal tingkat kemajuan di bidang pendidikan, misalnya, peringkat tertinggi diduduki Minahasa, disusul oleh Tanah Batak, Maluku, dan NTT. Sementara itu Jawa dan daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Hindu berada pada peringkat yang lebih rendah. Karena itu tidak heran bila orang Kristen doyan menjadi birokrat, dan pegawai/pejabat pemerintah (termasuk tentara) dari kalangan pribumi sebagian besar adalah orang Kristen. Di satu sisi hal ini cukup sering menimbulkan sikap arogan di kalangan Kristen, sedangkan di kalangan non-Kristen, terutama Islam, hal ini menimbulkan kemarahan. Abdul Muis, salah seorang tokoh Sarekat Islam yang duduk di dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat), misalnya, pada tahun 1920-an mengajukan

keberatan terhadap pemerintah H-B, karena menurut pengamatannya pemerintah memberikan sangat banyak subsidi kepada badan-badan zending bagi usaha mereka di bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan dana subsidi itu sebagian besar berasal dari *belasting* (pajak) yang dibayar oleh warga masyarakat beragama Islam.¹¹

Baik pemerintah H-B maupun kalangan zending dan gereja Kristen bisa saja berargumen bahwa subsidi itu bersifat *simbiosis mutualistis*: di satu sisi beban kerja pemerintah diringankan dan biaya penyelenggaraan pendidikan & kesehatan menjadi lebih murah bila dikerjakan kalangan Kristen, dan di sisi lain kalangan Kristen mendapat peluang meluaskan pelayanannya kepada masyarakat, termasuk yang bukan Kristen. Lagi pula lembaga-lembaga pendidikan/persekolahan dan kesehatan yang dapat mengikuti standar atau aturan yang ditetapkan pemerintah H-B (mengacu pada sistem pendidikan dan kesehatan Barat modern) adalah yang diselenggarakan kalangan Kristen. Hal ini tidak mengherankan, karena di kalangan pekerja zending dan gereja Kristen itu terdapat guru, dokter, insinyur dan tenaga profesional lain yang bersal dari Barat. Bagaimana pun juga, di kalangan masyarakat bukan Kristen fakta itu membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil. Karena itulah perlawanan terhadap penjajahan Belanda, terutama hingga awal abad ke-20, kebanyakan datang dari kalangan Islam.

Kemarahan – atau minimal rasa terganggu dan terlecehkan – di kalangan Islam menjadi semakin kuat karena kalangan zending Barat itu pada umumnya memperlihatkan sikap dan penilaian negatif terhadap Islam. Sebagian dari hal itu merupakan warisan Perang-perang Salib yang berlangsung abad ke-11 hingga ke-13 (bahkan di kawasan tertentu di Eropa hingga abad ke-16). Pada gilirannya sikap dan penilaian negatif itu diwariskan kepada gereja-gereja dan umat Kristen hasil penginjilan dan pembinaan mereka. Sangat banyak contoh tentang hal ini, dan karena itu tidak heran bila pada periode ini di sana-sini terjadi konflik berdarah di antara umat Kristen dan Islam. Kalaupun tidak sampai berdarah secara fisik, minimal menimbulkan luka batin (dan dendam berkepanjangan), terutama bila ada tulisan-tulisan yang beredar di kalangan Kristen, yang bernada menghina atau melecehkan agama dan umat Islam.

Syukurlah bahwa tidak semua orang Kristen pada periode ini memperlihatkan sikap dan pandangan negatif itu. Kita bisa mencatat beberapa tokoh yang sangat menghargai agama dan umat beragama lain, khususnya Islam, dan berusaha megungkapkan iman Kristennya dengan cara dan gaya yang akrab bagi masyarakat Islam. Misalnya C.L. Coolen dan Paulus Tosari di Jawa Timur, serta Ibrahim Tunggul Wulung dan Kyai Sadrach di Jawa Tengah (dan Jawa Barat).¹² Pihak Islam sendiri juga tidak semua memperlihatkan reaksi negatif terhadap sepafterjang kalangan Kristen. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, misalnya, menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan zending di Yogyakarta, walaupun menurut Alwi Shihab Muhammadiyah didirikan a.l. dalam rangka membendung penetrasi misi Kristen.¹³

¹¹ Aritonang, *Sejarah Perjumpaan*, h. 156.

¹² *Ibid*, h. 87-101; lihat juga A.G. Hoekema, *Berpikir dalam Keseimbangan yang Dinamis – Sejarah Lahirnya Teologi Protestan Nasional di Indonesia (sekitar 1860 – 1960)* (Jakarta: BPK G. Mulia, 1997), h. 46-78.

¹³ Alwi Shihab, *Membendung Arus – Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (terj.) (Bandung: Mizan, 1998).

III. Perkembangan Kristen [-Protestan] pada Masa Pendudukan Jepang dan Revolusi (1942-1949)¹⁴

Ketika Jepang menduduki Indonesia sejak Februari/Maret 1942, salah satu pihak yang banyak menjadi korban (penyiksaan hingga pembunuhan) adalah kalangan Kristen (Katolik maupun Protestan), terutama para misionaris Barat, tetapi juga pengerja/pejabat gereja dari kalangan pribumi (pendeta, guru, dsb.), bahkan tak sedikit warga gereja biasa. Pribumi Kristen itu ikut menjadi korban karena mereka didakwa sebagai kakitangan atau pendukung kekuasaan Barat yang menjadi musuh Jepang pada Perang Dunia II itu. Kalangan Islam pada awalnya menyambut hangat kedatangan tentara-pendudukan Jepang, dan memandang mereka itu sebagai saudara tua yang membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Apalagi jauh hari sebelum pendudukan itu pihak Jepang telah membuat sejumlah kebijakan dan langkah untuk menarik simpati umat Islam Indonesia (a.l. kongres Islam se-dunia di Tokyo dan Osaka 1939). Belakangan kalangan Islam kian menyadari bahwa Jepang juga menindas mereka (termasuk memperlakukan banyak kaum wanita mereka sebagai *jugun ianfu*, wanita penghibur).

Kendati banyak gereja dan orang Kristen menjadi korban penindasan Jepang (termasuk menjadi *romusha* dan *jugun ianfu*), tetapi ada juga yang bersikap mendukung (untuk tidak mengatakan menjilat) Jepang. Sejumlah tulisan dari kalangan Kristen pribumi memuji-muji Jepang sebagai pembebas, penolong, pelindung, dsb. Syukurlah, yang seperti itu tidak banyak, kendati yang bersikap kritis dan mengungkapkannya secara terbuka juga tidak banyak. Di antara mereka yang bersikap kritis itu adalah Amir Sjarifuddin [Harahap] dan Sam (G.S.S.J.) Ratulangie. Karena Jepang mengetahui bahwa tokoh-tokoh seperti mereka ini cukup berpengaruh di kalangan masyarakat (bukan hanya yang Kristen) maka kepada mereka ditawarkan juga jabatan tertentu di lingkungan pemerintah-pendudukan itu.

Dalam hal organisasi, pemerintah-pendudukan Jepang di Indonesia juga memprakarsai pembentukan wadah kesatuan mereka dengan maksud untuk memudahkan pengendalian atas mereka. Itu sejalan dengan tindakan pemerintah Jepang di negerinya, yaitu membentuk *Nippon Kirisuto Kyodan* (Gereja Kristus di Jepang). Wadah kesatuan gereja bentukan Jepang yang pertama di Indonesia adalah *Ambon-syu Kiristokyo Rengokai* (Pergabungan Gereja-gereja Masehi di Ambon), yang selanjutnya meluas ke Sulawesi dan Kalimantan. Wadah seperti ini, kendati merupakan hasil rekayasa penjajah Jepang, ada juga manfaatnya bagi kalangan gereja/orang Kristen pribumi; mereka kian saling mengenal dan menyadari nasib yang sama. Karena itulah wadah ini menjadi salah satu cikal-bakal wadah oikumenis (kesatuan gereja) yang setelah kemerdekaan Indonesia lebih dikembangkan (a.l. dalam wujud DGI/PGI).

Peranan orang Kristen yang tak kurang pentingnya pada zaman Jepang adalah dalam proses perumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sejumlah tokoh Kristen (a.l. Johannes Latuharhary, yang kelak menjadi gubernur Maluku yang pertama) berjuang dengan sangat gigih - bersama kaum nasionalis-sekuler - agar

¹⁴ Lihat a.l. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan*, h. 209-276, dan sejumlah literatur yang diacu di dalamnya.

dasar negara Indonesia bukan agama atau hukum Islam. Karena itu, walaupun - pada waktu penetapan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 - sebagian besar isi Piagam Djakarta 22 Juni 1945 dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (yang di dalamnya terdapat rumusan Dasar Negara yaitu Pancasila), tetapi tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret dari sila pertama dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.¹⁵

Karena orang Kristen (Katolik maupun Protestan) terbukti ikut berjuang melawan penjajah dan mempertahankan RI dari niat Belanda dan sekutunya untuk kembali menjajah Indonesia, maka di sepanjang masa Revolusi Fisik (1945-1949) hubungan umat Kristen dengan umat beragama lain, khususnya Islam, relatif cukup baik. Kalangan Kristen juga ikut menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan. Tak sedikit yang diangkat menjadi menteri di dalam kabinet-kabinet yang cukup sering jatuh-bangun di masa itu. Bahkan Amir Sjarifuddin dua kali menjabat Perdana Menteri, kendati akhir hidupnya cukup tragis dan ironis. Pada masa itu juga dibentuk sebuah partai politik bagi kalangan Kristen [-Protestan], yaitu Partai Kristen Nasional (PKN) (selanjutnya menjadi Partai Kristen Indonesia, Parkindo), 11 November 1945. Gereja-gereja menjalin hubungan baik dengan partai ini, dan sebagian cukup besar umat Kristen [-Protestan] menyalurkan aspirasi politik mereka melalui partai ini.

IV. Perkembangan Kristen [-Protestan] pada Masa Orde Lama (1950 – 1965)

Salah satu perkembangan penting di kalangan Kristen [-Protestan] pada awal periode Orde Lama ini adalah pembentukan DGI, 25 Mei 1950, oleh 22 organisasi gereja. Tujuan utama pembentukan wadah oikumenis ini – sebagaimana dikemukakan pada Anggaran Dasarnya – adalah “pembentukan Gereja Kristen yang Esa di Indonesia”. Rumusan ini di satu sisi merupakan rumusan teologis, mengacu pada cita-cita keesaan Gereja yang sudah tercantum di dalam Kitab Suci (Alkitab), a.l. dalam doa Yesus Kristus di taman Getsemani sebelum kematian-Nya (Yohanes 17:21). Di sisi lain rumusan ini mengandung muatan politis, yakni mendukung cita-cita kesatuan negara dan bangsa Indonesia dalam wujud NKRI. Dengan kata lain, sebagian besar dari gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia pada waktu itu menyadari pentingnya kesatuan bangsa, yang juga harus didukung oleh kesatuan (keesaan) Gereja. Karena itulah DGI mendukung kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan (sebagaimana dicanangkan pada 17 Agustus 1950), setelah sebelumnya negara ini berbentuk federal (RIS).

Pada periode ini jumlah organisasi gereja Protestan di Indonesia bertambah dengan cukup pesat. Hingga 1950 baru ada sekitar 40-an (20-an di antaranya bergabung dalam DGI, dan dapat disebut sebagai gereja-gereja arus utama dan merupakan gereja-gereja terbesar dalam hal jumlah anggota, dari Sumatera Utara hingga Maluku, menyusul Irian Barat/Papua pada tahun 1956). Tetapi pada akhir periode ini sudah menjadi sekitar 80-an, termasuk gereja-gereja

¹⁵ Bnd. penegasan Dr.Hidayat Nurwahid (Ketua MPR RI, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera/PKS) dalam ceramahnya di Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI, 22-26 Januari 2007, di Manado: “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Piagam Djakarta minus tujuh kata itu.”

Pentakostal (penginjlanya sudah hadir sejak 1920-an, tetapi organisasinya baru sejak 1930-an), gereja-gereja Baptis (hadir dalam wujud badan/kegiatan misi sejak awal abad ke-19, tetapi baru terbentuk sebagai organisasi gereja sejak 1950-an), dan gereja-gereja Injili (sebagai badan/kegiatan misi sejak 1950-an, sebagai organisasi gereja sejak akhir 1960-an).

Di bidang politik peranan kalangan Protestan cukup menonjol. Di dalam sekian banyak kabinet yang terbentuk dan jatuh-bangun di sepanjang periode ini, tidak pernah tidak ada wakil dari kalangan Protestan, baik dari Parkindo maupun dari kalangan nasionalis-sekuler. Salah satu tokoh yang cukup menonjol adalah dr. Johannes Leimena, yang menjadi Wakil Perdana Menteri II (bahkan beberapa kali menjadi Presiden *ad interim* ketika Soekarno mengadakan perjalanan ke luar negeri). Soekarno sendiri terkenal dekat dengan kalangan Kristen (baik Protestan maupun Katolik), a.l. karena pengalaman dan pergaulannya pada masa penjajahan hingga pada waktu ia menjadi Presiden. Cukup sering Soekarno menghadiri upacara atau peristiwa penting di kalangan Kristen, a.l. dalam Sidang Lengkap DGI tahun 1956 dan 1964, sidang pembentukan East Asia Christian Conference (EACC) 1957, dan Yubileum 100 Tahun HKBP 1961. Karena itu tidak heran bila kalangan Kristen (lewat Parkindo) ikut mendukung pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pada tahun 1963. Dan tidak heran pula bila kalangan tertentu menilai gereja dan orang Kristen di Indonesia pada masa Orde Lama ini terlalu dekat (untuk tidak mengatakan menjilat) kepada penguasa.

Kendati demikian, tidak semua orang Kristen mendukung Soekarno di setiap waktu serta dalam semua kebijakan dan tindakannya. Pada masa Orde Lama ini terdapat sejumlah gerakan separatis atau pemberontakan; selain DI/TII, yang penting dicatat adalah PRRI dan Permesta. Di dalam kedua kelompok ini (apalagi di kalangan Permesta) terdapat banyak orang Kristen, sipil maupun militer. Bahkan di dalamnya ada “seksi/bagian kerohanian”, yang didukung oleh gereja. Dan menarik juga untuk dicatat bahwa di dalam PRRI kalangan Islam dan Kristen dapat bekerjasama dengan erat dan membangun hubungan persahabatan.

Tidak semua orang Kristen yang menentang Soekarno melibatkan diri dalam gerakan separatis seperti itu. Jenderal Mayor (kemudian Letjen) **Tahi Bonar Sumatupang**, misalnya, kendati menentang kebijakan Soekarno (sehingga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI pada tahun 1952 dan berhenti dari dinas militer 1959¹⁶), dalam hal tertentu mendukung pemikiran Soekarno, walaupun secara kritis dan berusaha menggali dasar teologisnya. Ketika Soekarno sejak awal 1960-an banyak berbicara tentang “Revolusi Kita”, Simatupang - yang sejak 1959 mulai melibatkan diri dalam kegiatan gereja pada aras nasional (DGI) dan internasional (EACC/CCA dan WCC) - menerjemahkan atau menerapkan gagasan itu ke dalam lingkungan gereja.¹⁷ Karena itu tidak heran bila pada akhir masa Orde Lama ini kalangan Kristen di Indonesia, termasuk DGI, banyak juga menyerukan revolusi. Bahkan atas nama revolusi orang Kristen juga ikut-ikutan menyerukan “ganyang Malaysia”.

¹⁶ T.B. Simatupang, *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), bab VII.

¹⁷ Lihat a.l. kumpulan karangan T.B. Simatupang, *Tugas Kristen dalam Revolusi* (Jakarta: BPK, 1967). Di dalam tulisan-tulisannya pada periode ini hingga 1980-an kita sering menemukan ‘tetra kata’ yang dirumuskan Simatupang sebagai sikap orang Kristen: konstruktif (belakangan menjadi positif), kreatif, realistik, dan kritis.

V. Perkembangan Kristen [-Protestan] pada Masa Orde Baru (1966 – 1998)

Parohan pertama masa Orde Baru (1966-1982) dalam arti tertentu dapat disebut sebagai ‘masa keemasan’ kekristenan di Indonesia. Beberapa faktor penyebab dan indikatornya a.l.:

- (1) Pertambahan jumlah orang Kristen secara signifikan: Setelah kegagalan G30S/PKI, banyak orang memilih menjadi Kristen, karena takut dituduh PKI dan karena pemerintah tidak memberi tempat (hak hidup) di negeri ini bagi orang yang tidak beragama. Cukup banyak dari mereka yang lebih suka memilih masuk Kristen, karena organisasi-organisasi Islam sangat giat pada waktu penumpasan PKI, sehingga mendatangkan rasa jeri pada mereka.¹⁸
- (2) Sehubungan dengan adanya ‘kebangunan rohani’ ataupun ‘peluang emas’ pasca G30S itu, semakin banyak badan penginjilan (misi) dari luar negeri yang berkiprah di Indonesia, terutama dari kalangan Evangelical (Injili) dan Pentakostal-Kharismatik. Sejalan dengan itu berdirilah puluhan organisasi gereja baru, baik yang disponsori oleh badan-badan misi itu maupun hasil ‘pembiakan’ (perpecahan) dari gereja-gereja yang sudah ada sebelumnya.
- (3) Banyak pejabat tinggi negara (menteri dsb.) dari kalangan Kristen (Protestan maupun Katolik). Kita misalnya masih mengingat trio RMS (Radius, Maraden [atau Murdani] dan Sumarlin). Karena gereja-gereja/orang Kristen merasa dekat dengan penguasa, mereka merasa mendapat kebebasan untuk mengembangkan diri di berbagai bidang kehidupan, dan sedikit-banyak hal itu mendatangkan sikap arogan di kalangan Kristen tertentu.

Dalam situasi seperti itu tidak heran bila [sebagian dari] kalangan Islam merasa terganggu bahkan terancam. Mulailah ditiupkan isu kristenisasi, dan semakin banyak polemik terjadi di antara kalangan Kristen dan Islam mengenai hal itu. Salah satu di antaranya adalah menjelang, pada waktu, dan sesudah Musyawarah Antar-Agama 30 November 1967.¹⁹ Pada waktu itu beberapa tokoh Islam (a.l. H.M. Rasjidi dan M. Natsir) mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan yang pada intinya melarang penyiaran agama lain kepada orang yang sudah beragama tertentu. Kalangan Kristen (a.l. T.B. Simatupang) menentang usul itu, karena menurut mereka hal itu bertentangan dengan sifat-dasar agama Kristen sebagai agama misioner, maupun dengan kebebasan beragama (termasuk beralih agama) yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah tidak begitu saja mengikuti kemauan pihak Kristen. Sejak akhir 1960-an mulai dikeluarkan sejumlah ketentuan yang bertujuan menjaga kerukunan maupun membatasi atau mengendalikan kebebasan menyiarkan agama, termasuk mendirikan rumah ibadah dan menerima bantuan dari luar negeri (baik tenaga maupun dana) untuk urusan penyiaran agama, a.l. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 1/1969 serta SK Menteri Agama no. 70 dan 77/1978. Semua itu bukan membuat hubungan di antara umat beragama – khususnya Kristen dan Islam – menjadi lebih baik, melainkan sebaliknya.

¹⁸ Salah satu tulisan yang menggambarkan hal itu adalah Avery T. Willis Jr., *Indonesian Revival: Why Two Millions Came to Christ* (South Pasadena: William Carey Library, 1977).

¹⁹ Salah satu faktor yang mendorong pemerintah menyelenggarakan musyawarah itu adalah Peristiwa Makassar 1 Oktober 1967, yang mengakibatkan banyak kerugian di kalangan Kristen. Uraian agak rinci tentang Peristiwa Makassar maupun Musyawarah Antar-Agama itu lihat a.l. dalam Aritonang, *Sejarah Perjumpaan*, h. 382-397.

Ketegangan hubungan itu semakin meningkat, juga karena kalangan Injili dan Pentakostal-Kharismatik sangat gencar menyiarkan ajaran mereka (yang biasa mereka sebut memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa). Bahkan tidak sedikit dari mereka ‘menggarap’ sesama Kristen atau warga gereja lain. Agresivitas penyiaran agama itu a.l. bertolak dari pemahaman dan keyakinan bahwa agama (ajaran gereja)nyalah yang paling benar, serta penganut agama (ajaran gereja)nyalah yang paling terjamin selamat di dunia maupun di akhirat. Karena itu tidak heran bila pada masa ini sangat banyak polemik di antara kalangan Kristen dan Islam, yang a.l. tertuang dalam banyak tulisan (baik buku maupun artikel di media-media massa).

Sebenarnya kira-kira berbarengan dengan semakin tingginya tingkat ketegangan hubungan di antara penganut kedua agama ini, sudah dimulai juga rangkaian musyawarah atau dialog antar [umat ber]agama, baik di luar maupun di dalam negeri.²⁰ Kegiatan ini semakin banyak diadakan berbarengan dengan semakin berkembangnya wacana dan wawasan pluralisme. Di sepanjang masa Orde Baru, dan berlanjut hingga ‘Era Reformasi’ sekarang ini, tak terhitung banyaknya kegiatan yang bersifat antar-agama/*interfaith* (dengan berbagai istilah), baik berupa musyawarah atau dialog yang berlangsung beberapa jam atau beberapa hari, maupun studi yang lebih serius dan mendalam, dan berlangsung dalam jangka waktu lebih lama. Seiring dengan itu dibentuk juga berbagai forum ataupun organisasi lintas-agama, a.l. DIAN Interfidei, MADIA, dan ICRP. Kita tidak boleh meremehkan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh kegiatan-kegiatan maupun organisasi-organisasi itu. Namun demikian harus diakui bahwa hasilnya belum optimal dan maksimal, terutama kalau kegiatan itu diprakarsai pemerintah.

Kekurang-berhasilan itu menjadi sangat mencolok ketika sejak 1996 terjadi sejumlah konflik bersimbah darah (Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya, dll.). Memang kita tidak dapat mengatakan bahwa rangkaian konflik itu murni konflik antar-agama. Bahkan sangat jelas terlihat berbagai faktor lain yang lebih dominan (kesenjangan sosial-ekonomi, rivalitas antar-etnis dan budaya, dan berbagai agenda politik dari kalangan yang berkuasa). Namun demikian, tak dapat disangkal bahwa faktor agama sedikit-banyak juga berperan di dalamnya.²¹

Di tengah-tengah berbagai konflik itu, bahkan sebelumnya juga, sudah terasa berbagai tekanan yang semakin kuat sejak 1990 (a.l. ditandai oleh pembentukan ICMI 7 Desember 1990), kalangan Kristen [-Protestan] terus berusaha untuk berkiprah, bahkan berkembang. Walaupun pembangunan rumah ibadah semakin sulit mendapat izin, mereka tidak kehilangan akal: mulai menggunakan gedung-gedung pertemuan umum (termasuk hotel dan restoran) atau menyewa ruko (rumah-toko) untuk beribadah. Sekolah-sekolah Kristen (terang-terangan atau-

²⁰ Dua dari antara pertemuan-dialog yang penting di luar negeri yang juga diikuti tokoh-tokoh antar-agama dari Indonesia pada awal masa Orde Baru ini adalah di Ajaltoun (Libanon) tahun 1970, dihadiri a.l. oleh Mukti Ali (Islam) dan P.D. Latuhamallo (Kristen), dan di Chambesy (Swiss) 1976, dihadiri a.l. oleh H.M. Rasjidi (Islam) dan Ihromi (Kristen).

²¹ Kajian tentang berbagai konflik itu tertuang dalam ratusan (bahkan ribuan) tulisan di dalam dan di luar negeri. Di antaranya adalah: Aritonang, *Sejarah Perjumpaan*, h. 463-479; Fatimah Husein, *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia – The Exclusivist and Inclusivist Muslim’s Perspectives* (Bandung: Mizan, 2005), dan Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007; disertasi di Utrecht University, 2006).

pun secara agak tersamar), demikian juga berbagai lembaga pelayanan, juga terus bertumbuh. Jumlah organisasi gereja pun terus terjadi bertambah (termasuk di Sulut), hingga mencapai sekitar 300, walaupun persentase jumlah umat Kristen sejak 1990 relatif stabil (sekitar 10 % dari seluruh penduduk Indonesia). Ketika peluang untuk menjadi pejabat negara semakin terbatas, banyak dari kalangan Kristen meningkatkan kiprah di sektor swasta. Karena itu, walaupun pada akhir periode Orde Baru ini banyak orang Kristen yang mengeluh (bahkan meratap), tetapi secara umum dan secara kuantitatif tidak terlihat penurunan yang signifikan.

VI. Perkembangan Kristen [-Protestan] pada ‘Era Reformasi’ (1998 – 2007)

Memasuki ‘Era Reformasi’ terlihat perkembangan yang terkesan paradoksal. Di satu sisi, konflik dan kerusuhan bermuatan agama yang masih terus berlangsung, bahkan bobotnya meningkat secara sangat signifikan, seperti yang a.l. terjadi di Jakarta (November 1998), Poso (1998-2003/2006), dan Ambon/Maluku (1999-2002), mendatangkan pukulan berat terhadap gereja dan umat Kristen di negeri ini.²² Tetapi di sisi lain, terutama sejak Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden (1999-2001), terasa juga sedikit angin segar, yaitu iklim dan suasana demokratis, yang a.l. ditandai kebebasan yang lebih besar untuk bersuara dan berserikat.

Di bidang politik, misalnya, sejak menjelang Pemilu 1999 hingga menjelang Pemilu 2004 telah terbentuk [kembali] belasan partai politik berlabel Kristen (walaupun sebagian tidak sangat eksplisit, misalnya Partai Demokrasi Kasih Bangsa/PDKB dan Partai Damai Sejahtera/PDS). Ketika kita sekarang mulai pasang kuda-kuda dan bersiap diri menuju Pemilu 2009, jumlah partai politik Kristen lebih ‘gila’ lagi, sudah lebih dari 20 buah. Walaupun perolehan suara dari partai-partai berlabel Kristen itu pada Pemilu 1999 dan 2004 tidak cukup memadai, karena sebagian besar orang Kristen masih menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai-partai yang bercorak nasionalis-sekuler (terutama Golkar, PDIP dan Partai Demokrat)²³, tetapi masih ada, bahkan kian banyak saja, orang Kristen yang berminat membentuk partai politik berlabel Kristen. Yang tak kalah menarik, kalangan Injili dan Pentakostal-Kharismatik pun terlihat semakin doyan berpolitik, hal yang kurang terlihat hingga akhir masa Orde Baru.

Dalam hal jumlah organisasi gereja, pada periode ini di kalangan Protestan (lebih tepat: non-Katolik) masih terus saja terjadi penambahan, sehingga sampai akhir 2004 jumlahnya sudah mencapai 323.²⁴ Sebagian besar dari organisasi gereja yang baru itu merupakan sempalan dari gereja-gereja yang sudah ada, sehingga sebenarnya jumlah orang Kristen di negeri ini

²² Gambaran agak rinci tentang berbagai peristiwa itu s/d 2003 a.l. terdapat dalam Aritonang, *Sejarah Perjumpaan*, h. 532-575 dan sejumlah literatur yang diacu di dalamnya. Peristiwa terakhir di Poso adalah tertembak-matinya Pdt. Irianto Kongkoli, Sekretaris Umum GKST, 16 Oktober 2006.

²³ Kajian tentang hal ini a.l. saya sajikan pada artikel berjudul “Partisipasi dan Inklinasi Kristen Indonesia di dalam Pemilihan Umum”, dalam Jan S. Aritonang, *Belajar Memahami Sejarah di Tengah Realitas* (Bandung: Jurnal Info Media, 2007), h. 22-38.

²⁴ Pertambahan itu secara mencolok terjadi ketika Dr. (HC) P. Siahaan STh menjadi Dirjen Bimas (Kristen) Protestan, terutama menjelang akhir masa jabatannya (a.l. terbentuk Gereja Bethany Indonesia, Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Kristus Yesus, dan Gereja Kemah Abraham). Ketika Dr. Jason Lase MSi menjadi Dirjen (sejak akhir 2004), ia mencanangkan ‘zero growth’ alias tidak mengizinkan penambahan jumlah organisasi gereja. Apakah kebijakan itu dapat ia pertahankan hingga akhir masa jabatannya, kita nantikanlah dengan hati berdebar.

praktis tidak bertambah, hanya ‘pindah kandang’ atau ‘pindah aquarium’ saja. Karena itu patut diragukan kebenaran klaim dari kalangan Kristen tertentu bahwa orang Kristen di negeri ini sudah mencapai 15-20 % dari seluruh penduduk. Yang dapat ditengarai adalah: banyak orang Kristen yang terdaftar sebagai anggota di dua, tiga, atau empat organisasi gereja, sehingga kalau ditotal jumlah keseluruhan lebih dari 10 % dari penduduk Indonesia. Bagaimana pun juga, isu peningkatan jumlah yang ‘spektakuler’ ini menimbulkan keresahan di kalangan Islam.

Adanya kegemaran di kalangan Kristen tertentu untuk melakukan *mark up* atas jumlah orang Kristen di negeri ini didasarkan dan didorong oleh berbagai alasan atau faktor, a.l.: (1) keinginan untuk memperlihatkan keberhasilan mereka melakukan apa yang mereka pahami sebagai ‘pekabaran Injil’ (seakan-akan sukses pekabaran Injil diukur dengan penambahan jumlah orang Kristen); (2) memberi gambaran kepada dunia (khususnya kepada mitra-luar negeri dari para ‘penginjl’ di Indonesia) bahwa peluang untuk ‘mengabarkan Injil’ (baca: menambah jumlah orang Kristen) masih tetap terbuka lebar, sehingga dana pendukung diharapkan akan mengalir terus; (3) keyakinan bahwa kebenaran dan keselamatan hanya ada di dalam agama/gereja Kristen (agama/gereja Kristen diidentikkan dengan Yesus Kristus).²⁵

Di tengah-tengah semua perkembangan itu, ada beberapa isu aktual yang sedang merebak, yang membuat umat Kristen (Katolik maupun non-Katolik) di Indonesia harus memikirkan atau menata-ulang kehadiran dan kiprahnya di negeri ini, antara lain:

- (1) Pendidikan Agama di sekolah-sekolah: Menurut UU Sisdiknas no. 20/2003, pelajaran Agama di sekolah (dari TK hingga Perguruan Tinggi) harus sesuai dengan agama dari siswa ybs., dan diberikan oleh guru agama ybs. Itu berarti bahwa di sekolah-sekolah Kristen pelajaran Agama Kristen tidak boleh diberikan kepada siswa yang bukan Kristen.
- (2) Pengaturan/pengendalian pengadaan rumah ibadah: Setelah terbitnya Peraturan Bersama Dua Menteri (PB2M), yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 9 & 8/2006 ttgl. 21 Maret 2006, sebagai pengganti SKB no. 1/1969, di satu sisi kalangan Kristen merasa bahwa pembangunan rumah ibadah kini kian dipersulit, karena syarat-syarat yang berat dan karena ada kesan bahwa PB2M itu tidak diberlakukan kepada penganut agama lain (terutama Islam). Tetapi di sisi lain kasus pengrusakan/pembakaran/pelarangan pembangunan rumah ibadah (khususnya terhadap kalangan Kristen) semakin berkurang, walaupun insiden-insiden semacam itu masih terus terjadi hingga tahun 2007 ini.²⁶
- (3) Maraknya Peraturan Daerah (Perda): Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah no.22/1999, banyak daerah menyusun Perda yang bernuansa/bermuatan agama (d.h.i. Syariat Islam), sementara kita pahami bahwa semua ketentuan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara. Belakangan ada daerah tertentu yang mengklaim diri sebagai daerah Kristen, lalu menyusun RUU bermuatan ‘Injil’, dan hal ini mengundang kehebohan.

²⁵ Di dalam Alkitab (a.l. Yohanes 14:6) memang Yesus menyatakan, “Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” Tentu orang Kristen boleh (bahkan harus) meyakini pernyataan ini. Tetapi itu tidak identik dengan pernyataan: kebenaran hanya ada di dalam gereja Kristen karena gereja Kristen adalah persekutuan yang terdiri dari orang-orang berdosa juga.

²⁶ Salah satu kasus adalah penyerangan terhadap jemaat HKBP Tangerang. Beritanya a.l. dimuat dalam tabloid *Reformata* edisi 16-30 September 2007.

Penutup: Beberapa Catatan Reflektif

Dari uraian di atas terlihat bahwa agama dan umat Kristen Protestan telah hadir dan berkembang di negeri ini selama lebih dari empat abad. Kalangan Kristen Protestan bersama Katolik telah berkiprah di berbagai bidang kehidupan, baik dalam penyiaran agama maupun pelayanan sosial-ekonomi-budaya (bahkan juga politik) dan pengembangan masyarakat. Yang pada awalnya sangat menonjol adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Belakangan kiprahnya meluas ke bidang hukum dalam angka penegakan keadilan dan HAM, kesetaraan gender, serta pengembangan sosial-ekonomi masyarakat dan daerah miskin dan tertinggal. Masyarakat dan pemerintah negeri ini patut mengakui dan menghargai banyak hal baik yang sudah dan akan terus diupayakan kalangan Kristen di negeri ini.

Tanpa mengabaikan banyak hal yang baik itu, dari uraian di atas juga terlihat bahwa ada juga hal yang salah yang dilakukan oleh gereja/orang Kristen Protestan. Salah satu yang paling mencolok adalah kegemaran untuk mendukung dan mendekati kepada penguasa. Sebenarnya hal ini tidak selalu salah, terutama kalau pemerintah itu menjalankan kekuasaan sesuai dengan kehendak Tuhan (mendatangkan damai sejahtera, keadilan dan kemakmuran bagi rakyat). Tetapi kalau pemerintah yang zalim dan korup juga didukung, soalnya menjadi lain. Pada zaman VOC dan Hindia-Belanda, misalnya, gereja tidak pernah mengecam penjajahan. Karena itu tidak selalu salah kalau ada dari umat beragama lain yang mendakwa gereja/orang Kristen sebagai kakitangan atau antek penguasa, pada masa penjajahan maupun di masa merdeka.

Karena itu pula, berbicara tentang tantangan dan peluang, salah satu tantangan paling mendasar yang harus dijawab gereja/orang Kristen bukanlah pembatasan ataupun tekanan-tekanan yang datang dari pemerintah ataupun umat beragama lain, melainkan mengubah *mindset* dan paradigmanya, dalam hal ajaran maupun praksis. Sudah bukan zamannya lagi mempertahankan pemahaman *extra ecclesiam nulla salus* (dalam hal ini Gereja Katolik sudah jauh lebih maju). Juga bukan zamannya lagi untuk terus-menerus menempel pada penguasa. Bila hal itu dilakukan maka peluangnya untuk tetap berkiprah dan membawa manfaat (menjadi berkat) bagi bangsa dan negeri ini tetap besar.

Untuk itu gereja/umat Kristen perlu terus didorong untuk menjalin hubungan penuh persahabatan dengan umat beragama lain, tanpa harus kehilangan jatidiri dan sikap kritisnya, dan tanpa harus tunduk begitu saja terhadap kemauan pihak lain (misalnya menjadikan agama atau hukum agama tertentu sebagai dasar negara ini). Bahkan juga perlu didorong untuk kian giat mempelajari seluk-beluk agama/keyakinan lain, bukan dalam rangka polemik-apologetik, melainkan mengembangkan *theologia religionum* bersama-sama dengan umat beragama lain.

Selain menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan umat beragama lain yang resmi (Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu) kalangan Kristen juga perlu memberi perhatian dan penghargaan kepada agama-agama lokal (dengan demikian juga kepada kearifan lokal). Dengan demikian kalangan Kristen – semoga juga umat beragama lain – mengembangkan religiositas (keberagamaan) dan teologi yang lebih kontekstual. Itu bukan berarti menyerap keyakinan agama lokal itu secara sinkretistik, melainkan belajar dari mereka tentang tatacara

mengungkapkan keberagaman yang sesuai dengan citarasa dan pola berteologi masyarakat Indonesia yang sebagian ebsar masih hidup di desa-desa. Beberapa contoh memperlihatkan bahwa penghargaan seperti itu menciptakan harmoni dan kedamaian.²⁷

Kepustakaan Terbatas:

- Aritonang, Jan S. *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, ⁷2005.
- . *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, ³2006.
- . *Belajar Memahami Sejarah di Tengah Realitas*. Bandung: Jurnal Info Media, 2007.
- (peny.). *Gereja Abad 21 – 50 Tahun PGI*. Jakarta: Balitbang PGI, 2000.
- End, Th. van den. *Ragi Carita – Sejarah Gereja di Indonesia*, 2 jilid. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980 (jilid 1), ⁵2002 (jilid 2).
- Hoekema, A.G. *Berpikir dalam Keseimbangan yang Dinamis – Sejarah Lahirnya Teologi Protestan Nasional di Indonesia (sekitar 1860 – 1960)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Husein, Fatimah. *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia – The Exclusivist and Inclusivist Muslim’s Perspectives*. Bandung: Mizan, 2005.
- Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007 (disertasi di Utrecht University, 2006).
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, ⁴1994 (edisi revisi: *Sejarah Indonesia Modern, 1200 - 2004*: Serambi Ilmu Semesta, 2005).
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus – Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (terj.). Bandung: Mizan, 1998.
- Steenbrink, K. *Kawan dalam Pertikaian – Kaum Kolonial dan Islam di Indonesia (1596 – 1942)* (terj.). Bandung: Mizan, 1995.
- Steenbrink, K. & Jan S. Aritonang. *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden: E.J. Brill, 2008 (dalam proses terbit).
- Ukur, F. & Cooley, F. *Jerih dan Juang – Laporan Nasional Survey Menyeluruh Gereja di Indonesia*. Jakarta: LPS DGI, 1979.

²⁷ Hal itu misalnya diupayakan lembaga *Percik* (Persemaian Cinta Kemanusiaan) di Salatiga sejak 1996 dengan membentuk komunitas antar-iman yang berbasis agama dan kepercayaan/religiositas dan nilai-nilai budaya lokal. Lihat a.l. leaflet *Berteologi Lokal* (Salatiga: Percik, cetakan III^b)